



Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kemenhub yang Menjadikan Bandara SMB II sebagai Bandara Domestik

Krisna Herlambang¹, Andi Muhammad Yasin²

Institut Pariwisata Trisakti ^{1,2}

e-mail: mr.krisna24@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the public's perception of this policy using a qualitative approach, through in-depth interviews with several respondents directly affected, such as air travelers, tourism business operators, and academics. The findings indicate that this policy has led to an increase in travel costs for passengers, affecting their purchasing power and mobility. The policy has also resulted in a decline in the number of foreign tourists visiting the region, which has directly impacted the revenue of the tourism sector and the local economy as a whole. An important finding from this study is that the policy was not based on an in-depth analysis of its effects on various sectors, particularly the tourism sector and the local economy. Through an analysis using Thomas R. Dye's Public Policy Theory, it is found that policies that do not consider the impacts on various related sectors can lead to public dissatisfaction and worsen economic conditions and public mobility. This study recommends the need for a reevaluation of the policy regarding the status change of Sultan Mahmud Badaruddin II Airport, taking into account input from the public and stakeholders so that the policy can better align with public interests and support improved economic development and mobility.

Keywords: Public Policy, Public Perception, Economic Impact, Mobility.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan sejumlah responden yang terdampak langsung, seperti pengguna jasa penerbangan, pelaku usaha pariwisata, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengakibatkan peningkatan biaya perjalanan udara bagi penumpang, yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan mobilitas mereka. Kebijakan ini juga menyebabkan penurunan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke daerah tersebut, yang berdampak langsung pada menurunnya pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi lokal secara keseluruhan. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap berbagai sektor, terutama sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Dalam analisis menggunakan Teori Kebijakan Publik Thomas R. Dye, ditemukan bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan berbagai sektor terkait dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan memperburuk kondisi ekonomi serta mobilitas masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan perubahan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan ini dapat lebih selaras dengan kepentingan publik dan mendukung perkembangan ekonomi serta mobilitas yang lebih baik.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Persepsi Masyarakat, Dampak Ekonomi, Mobilitas.

PENDAHULUAN

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang merupakan salah satu bandara utama di Pulau Sumatera yang selama bertahun-tahun melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun, kebijakan terbaru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menetapkan Bandara SMB II sebagai bandara domestik telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Keputusan ini membawa dampak signifikan terhadap konektivitas internasional, ekonomi lokal, serta persepsi masyarakat mengenai efektivitas kebijakan transportasi udara di Indonesia (Aini et. al., 2023).

Perubahan status ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi lalu lintas udara dan penataan jaringan penerbangan nasional. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah efisiensi operasional serta pemusatan penerbangan internasional ke bandara-bandara tertentu yang dianggap lebih strategis. Namun, bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, keputusan ini memicu berbagai pertanyaan terkait kemudahan akses perjalanan internasional, dampak terhadap sektor bisnis dan pariwisata, serta kesiapan infrastruktur yang mendukung mobilitas antarnegara (Sutrisno et. al., 2022).

Perubahan status bandara ini bagi pelaku usaha menimbulkan tantangan tersendiri. Sebelumnya, Bandara SMB II melayani beberapa rute penerbangan internasional, seperti ke Singapura dan Malaysia, yang menjadi jalur utama bagi pekerja migran, wisatawan, dan pebisnis. Dengan status baru sebagai bandara domestik, perjalanan ke luar negeri kini harus melalui bandara internasional lain, seperti Soekarno-Hatta di Jakarta atau Kualanamu di Medan, yang dapat meningkatkan biaya dan waktu perjalanan. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi daya tarik investasi di Palembang.

Persepsi terhadap kebijakan ini cenderung beragam, sebagian pihak melihat keputusan ini sebagai langkah yang mengurangi aksesibilitas langsung ke luar negeri, sementara yang lain memandangnya sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan efisiensi penerbangan. Namun, ada pula kekhawatiran mengenai minimnya sosialisasi serta kesiapan alternatif transportasi bagi mereka yang terdampak oleh perubahan ini. Selain itu, masyarakat mempertanyakan sejauh mana keputusan ini didasarkan pada kajian mendalam terhadap kebutuhan dan potensi ekonomi wilayah Palembang (Prayoga, 2021).

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini penting untuk mengetahui bagaimana respons publik terhadap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat

penerimaan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kemenhub dalam menetapkan kebijakan transportasi udara yang lebih inklusif dan memperhitungkan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap implikasi kebijakan ini menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terakomodasi, sekaligus mendukung tujuan pembangunan sektor transportasi di Indonesia (Rahmadan et.al., 2024).

Kebijakan Transportasi Udara di Indonesia

Kebijakan transportasi udara di Indonesia diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan regulasi penerbangan sipil. Kebijakan ini mencakup aspek keselamatan, efisiensi, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan, perubahan status bandara dari internasional ke domestik merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan konektivitas udara dan mendukung perkembangan infrastruktur di berbagai daerah.

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang

Bandara SMB II merupakan salah satu bandara utama di Sumatera Selatan yang sebelumnya melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun, kebijakan terbaru Kemenhub mengubah statusnya menjadi bandara domestik penuh. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah penumpang, rute penerbangan, serta strategi pengembangan sektor aviasi nasional.

Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Publik

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap kebijakan, dampak yang dirasakan, serta pengalaman sebelumnya. Menurut teori kebijakan publik oleh (Dye, 2017), kebijakan yang diterima baik oleh masyarakat umumnya memiliki transparansi yang tinggi, komunikasi yang jelas, serta manfaat yang dirasakan secara langsung oleh warga.

Dampak Perubahan Status Bandara terhadap Masyarakat dan Ekonomi

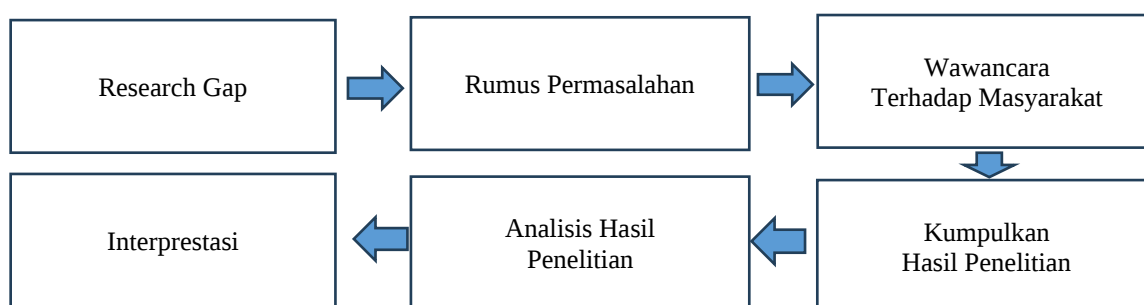
Perubahan status Bandara SMB II menjadi domestik memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung penerbangan domestik yang lebih stabil. Namun, dampak negatifnya dapat berupa penurunan jumlah wisatawan mancanegara serta berkurangnya peluang ekonomi dari sektor pariwisata dan perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara langsung

dengan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan perubahan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi bandara domestik. Responden dipilih secara purposif untuk mendapatkan variasi perspektif dari pengguna jasa bandara, pelaku usaha di sektor pariwisata, serta akademisi di bidang transportasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini, mengidentifikasi dampaknya, serta mengeksplorasi harapan masyarakat terhadap pengelolaan transportasi udara di Palembang.

Gambar 1
Alur Penelitian



Sumber: Data diolah, 2025

PEMBAHASAN

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang menjadikan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) sebagai bandara domestik telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagai salah satu gerbang utama transportasi udara di Sumatera Selatan, perubahan ini dianggap berdampak terhadap mobilitas masyarakat, sektor pariwisata, serta aktivitas bisnis dan ekonomi di daerah tersebut. Untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini, penelitian ini menggunakan wawancara dengan tiga responden yang berasal dari kalangan pengguna jasa penerbangan, pelaku usaha pariwisata, dan akademisi di bidang transportasi (Sari et.al., 2022).

Seorang travelling wisata mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan ini terhadap sektor pariwisata di Palembang. "Dulu, banyak turis dari Malaysia dan Singapura yang datang langsung ke Palembang untuk wisata kuliner dan budaya. Tapi sekarang, jumlah kunjungan menurun drastis karena akses yang semakin sulit," kata Yuni. Menurutnya, keputusan ini seharusnya ditinjau ulang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi lokal, terutama industri pariwisata yang sangat bergantung pada wisatawan mancanegara.

Seorang mahasiswa bernama Budi, yang bersangkutan adalah salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Palembang, memberikan perspektif akademis terkait kebijakan ini. Menurutnya, perubahan status bandara harus disertai dengan kajian mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi.

“Keputusan menjadikan SMB II sebagai bandara domestik mungkin memiliki alasan strategis, tetapi seharusnya ada kajian lebih lanjut tentang bagaimana hal ini mempengaruhi masyarakat dan dunia usaha. Jika kebijakan ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas, maka diperlukan evaluasi,” jelasnya.

Teori yang relevan dengan pembahasan ini adalah Teori Kebijakan Publik dari Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan berbagai sektor terkait. Dye menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan pemerintah, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus diperhitungkan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat (Putra et.al., 2022).

Dalam perubahan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) dari bandara internasional menjadi bandara domestik, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah memperhitungkan kepentingan masyarakat luas. Kebijakan ini seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif regulasi penerbangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak yang lebih luas, seperti sektor ekonomi, sosial, dan pariwisata. Jika kebijakan tidak memperhatikan berbagai sektor ini, maka konsekuensinya dapat berujung pada ketidakpuasan publik dan efek negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa perubahan status Bandara SMB II menjadi bandara domestik telah menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna jasa penerbangan, pelaku usaha pariwisata, serta akademisi yang mengamati kebijakan ini dari sudut pandang analisis kebijakan publik. Responden pertama, seorang pengusaha di sektor pariwisata, menyatakan kekhawatirannya terhadap penurunan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Palembang. Dengan dihapuskannya penerbangan internasional langsung, turis asing yang sebelumnya bisa langsung datang ke Palembang kini harus melewati perjalanan tambahan yang lebih rumit dan mahal. Akibatnya, sektor perhotelan, restoran, dan tempat wisata mengalami penurunan jumlah pengunjung, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian lokal.

Responden kedua, seorang mahasiswa yang mengkaji kebijakan publik, menilai bahwa keputusan ini tampaknya diambil tanpa kajian yang mendalam mengenai dampaknya terhadap ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa perubahan status bandara seharusnya melalui studi yang komprehensif agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Menurutnya, jika kebijakan ini tetap diterapkan tanpa revisi, maka dalam jangka panjang, Palembang bisa kehilangan daya tarik sebagai pusat ekonomi dan wisata di Sumatera Selatan. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan publik, harus memiliki landasan yang kuat

dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Jika suatu kebijakan hanya berorientasi pada aspek administratif tanpa melihat dampaknya secara lebih luas, maka ketidakpuasan publik akan meningkat dan berbagai sektor ekonomi dapat terdampak secara negatif. Oleh karena itu, kebijakan perubahan status Bandara SMB II ini perlu dievaluasi ulang agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang lebih baik.

KESIMPULAN

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang mengubah status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) menjadi bandara domestik telah menimbulkan berbagai dampak signifikan, terutama terhadap sektor ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengguna jasa penerbangan dan pelaku pariwisata mengalami kendala akibat hilangnya akses langsung bagi wisatawan asing, yang berakhir pada penurunan kunjungan dan pendapatan. Dari perspektif akademis, kebijakan ini dinilai kurang melalui kajian komprehensif mengenai dampaknya. Evaluasi ulang diperlukan agar keputusan ini tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. R., & Pratiwi, R. D. (2023). Persepsi Masyarakat pada Sarana dan Prasarana Pariwisata Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. *Jurnal Swarna Dwipa*, 11(2), 45-56.
- Prayoga, D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Jasa Transportasi Udara Terkait Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182. *Jurnal Komunikasi dan Sosial*, 2(1), 13-25.
- Rahmadan, A., Subagyo, A., & Sufianto, D. (2024). Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Putra, A. R., & Hidayat, R. (2022). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pasca Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 3(2), 150-162.
- Prasojo, G. P., & Zulkarnain, A. (2023). Strategi Membangun Kepercayaan Publik Bidang Transportasi Udara di Indonesia. *Jurnal Skyhawk*, 2(1), 45-58.
- Sutrisno, B., & Wibowo, A. (2022). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 245-256.
- Sari, D. P., & Rahmat, A. (2022). Analisis Persepsi Kepuasan Pengguna Transportasi Udara pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *Jurnal Flyover*, 4(1), 24-3
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.